

309

92

LAPORAN PENELITIAN

ASPEK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERBAIKAN  
SUNGAI BANJIR KANAL PADANG DALAM RANGKA  
BANTUAN O E C F JEPANG

OLEH : 1. FIRMAN HASAN, SH. LLM ( KETUA PELAKSANA )  
2. NAJMI, SH. MH ( Anggota )  
3. ZAINUL DAULAY, SH ( Anggota )  
4. MAGDARIZA, SH ( Anggota )  
5. MARDENIS, SH ( Anggota )  
6. SYOFIRMAN SYOFWAN, SH ( Anggota )



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian  
UNIVERSITAS ANDALAS Dibiayai dengan Dana Proyek  
Operasi dan Perawatan Fasilitas Universitas Andalas

1992 / 1993

Aspek Hukum dalam pelaksanaan Perbaikan Sungai Banjir Kanal Padang dalam rangka Bantuan OECF Jepang.

Oleh : - Firman Hasan, SH. LL.M.  
- Najmi, SH. MH.  
- Zainul Dauley, SH.  
- Hagdariza, SH.  
- Hardenis, SH.  
- Syofirman Syofyan, SH.

Fakultas Hukum Universitas Andalas  
Padang, tahun 1992

#### ABSTRAK

Karena kondisi alamnya yang sedemikian rupa Padang merupakan salah satu kota di Indonesia yang sering mengalami kebanjiran.

Untuk menanggulangi bahaya banjir ini, pemerintah kota berusaha untuk membenahi sistem pengendalian banjir yang telah ada. Salah satu diantaranya adalah perbaikan sungai banjir kanal Padang.

Usaha ini dapat dilaksanakan sekarang karena adanya bantuan dari pihak Jepang. Bantuan ini diperoleh melalui kerjasama antara kedua negara yang diatur dalam suatu perjanjian bilateral yang terbentuk Agreement.

Dilakasnakannya perbaikan sungai banjir kanal Padang ini sebagai salah satu bentuk realisasi Agreement tadi, menunjukkan bahwa proyek ini mengandung aspek Hukum Internasional.

Begitu juga dengan adanya penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak dan pemanfaatan atas tanah yang cukup luas untuk kepentingan proyek ini, menyebabkan proyek ini memiliki beberapa aspek Hukum tertentu.

Froyek ini diharapkan akan berhasil, jika ini terjadi kelak akan membawa dampak tertentu terhadap warga dan pemerintah Daerah Tingkat II Kodya Padang.



## BAB I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Latar Belakang Permasalah

Kotamadya Padang sebagai Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat mempunyai luas 695 Km<sup>2</sup>, dibatasi oleh Bukit Barisan di sebelah Timur dan Selatan, Daratan Anai di sebelah Utara serta di sebelah Barat oleh Lautan Hindia. Pertambahan penduduk 3,1% per tahun. Musim hujan biasanya antara bulan Oktober sampai bulan Desember, dengan rata-rata hujan 4.200 mm per tahun, temperatur 26<sup>o</sup> C kelembaban 83% dan penguapan 1.500 mm per tahun.

Berdasarkan topografinya, Kotamadya Padang pada ketinggian 1 m sampai 1.800 m di atas permukaan laut. Dibagian tengah merupakan daerah dataran dengan 5 km dari daerah pantai kearah Timur dan 10 Km ke arah yang menanjak sampai ketinggian 1.800 m.

Daerah dimana Kota ini terbentuk adalah yang dibentuk oleh tiga aliran sungai dan tiga anak sungai yang bermuara saling berdekatan di Lautan Hindia, yaitu: Batang Arau dengan anak sungainya Batang Jirak di Bagian Selatan, Batang Kuranji dengan anak sungainya Sungai Laras dan Sungai Belimbing di Bagian Tengah Batang Air Dingin di Bagian Utara. Luas daerah tangkapan hujan masing-masing 172 Km<sup>2</sup>, 213 Km<sup>2</sup>, dan 131 Km<sup>2</sup>. Dengan keadaan muara sungai dan daerah tangkapan hujan yang saling berdekatan, maka terjadinya banjir cenderung selalu dalam waktu yang bersamaan.

Penanggulangan banjir di Kotamadya Padang telah terlaksana sejak tahun 1981, dengan mengalihkan sebagian aliran banjir Batang Arau di Lubuk Begalung

## BAB VI

## HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tinjauan " Loan Agreement No. IP-360, dated December 14, 1990, between The Overseas Economic Cooperation Fund And The Republic of Indonesia " dari sudut Hukum Perjanjian Internasional.

Dalam Hukum Perjanjian Internasional dikenal beberapa istilah yang digunakan untuk perjanjian Internasional; misalnya Convention, Traktat, Declaration, Agreement dan lain-lain, yang semuanya berarti Perjanjian Internasional.

Perjanjian kerjasama keuangan antar pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia ini dituangkan dalam suatu Agreement yang disebut Loan Agreement.

Agreement merupakan suatu bentuk perjanjian Internasional yang sifatnya tidak resmi dan digunakan untuk hal-hal yang bersifat teknis dan administratif yang ditandatangani oleh wakil-wakil Departement Pemerintah dan tidak memerlukan ratifikasi.

Ditinjau dari Hukum Perjanjian Internasional, maka Loan Agreement ini tunduk pada ketentuan Konvensi Hukum Perjanjian Internasional 1969 ( Vienna Convention on The Law of Treaties 1969 ), yaitu sesuatu dengan pasal 1 Konvensi ini, yang berbunyi :

" Konvensi ini berlaku pada perjanjian antar negara ", Jepang sebagai negara pemberi pinjaman kepada Indonesia memberikan bantuan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan pembangunan di Indonesia, sebagaimana yang disebut dalam Pembukaan Loan Agreement tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan terhadap hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh dapat dipetik beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Jika melihat tujuan dari Loan Agreement no. IP 360 yakni untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan pembangunan di Indonesia yang antara lain diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan perbaikan Sungai banjir kanal Padang ini, maka Perjanjian Internasional ini jelas memiliki itikad baik (good faith) sesuai dengan isi pasal 26 konvensi Wina 1969.
2. Hasil pelaksanaan perbaikan Sungai Banjir Kanal Padang sebagai salah satu perwujudan isi agreement ini turut menentukan apakah pihak Indonesia menghargai itikad baik dari pihak Jepang ataukah tidak. Untuk menunjukkan bahwa negara kita menghargai itikad baik ini maka mau tidak mau negara kita harus memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat banyak. ini berarti pelaksanaan perbaikan Sungai Banjir Kanal harus berhasil sesuai dengan keinginan pihak Jepang sebagai pemberi bantuan.
3. Untuk mendukung tercapainya keberhasilan itu maka hendaklah setiap kebijaksanaan, aktifitas ataupun tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek ini sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.
4. Hingga saat ini proyek perbaikan Sungai banjir



kanal berjalan dengan lancar karena pihak pelaksana disamping berusaha melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan, juga berusaha untuk tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

5. Keberhasilan proyek ini kelak akan dinikmati oleh masyarakat bersama pemerintah Daerah Tk. II Kodya Padang.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman, SH . Tebaran pikiran tentang studi Hukum dan masyarakat, PT Media Sarana Press, 1987.
- H. Syamsul Bahri Dt.Saripado,SH. Hukum Agraria Indonesia Selayang Pandang, Fakultas Hukum UNAND, 1983
- Drs. H.S Syarif. Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja asing di Indonesia dan peraturn-peraturannya, Sinar Grafika, 1992.
- Drs. Yunus Shamad. Pengupahan Pedoman bagi Pengelola Sumber daya Manusia di Perusahaan, PT Bina Sumber Daya Manusia, 1992.
- Suryono, Edi, SH. Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia. Bandung, CV.Remaja Karya, 1984.
- Wasito, SM, Hk. Konvensi-konvensi Wina - Andi Offset, Yogyakarta, 1984.
- Buku Usulan Proyek Pengendalian Banjir Kota Padang. Kanwil Departemen Pekerjaan Umum, Sum-Bar.